



Kopi dan Kolonial: Kontribusi Afdeling Malang terhadap Ekonomi Kolonial Belanda, 1830-1930

Moh. Heris Setiawan,^{1*} Daya Negri Wijaya¹

¹Universitas Negeri Malang, Indonesia

* moh.heris.2407318@students.um.ac.id

Dikirim: 29-05-2025; Direvisi: 09-06-2025; Diterima: 08-11-2025; Diterbitkan: 11-12-2025

Abstrak: Era Kolonial Belanda, kopi bukan sekadar komoditas saja, namun juga menjadi alat kekuasaan dan penopang utama ekonomi Hindia Belanda. Wilayah Pulau Jawa, khususnya Afdeling Malang, berperan penting dalam produksi kopi sejak berlakunya sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada tahun 1830. Penelitian ini berawal dari keingintahuan mengenai bagaimana peran Afdeling Malang, dengan segala potensi geografis dan sosialnya, berkontribusi terhadap ekonomi kolonial selama satu abad lebih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri peran Afdeling Malang dalam jaringan produksi dan distribusi kopi kolonial khususnya dalam bidang ekonomi, sekaligus melihat dampaknya terhadap masyarakat lokal kala itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah sebagai teknik utama pengumpulan sumber data. Sumber data yang dianalisis meliputi buku, jurnal penelitian, arsip kolonial, dokumen pemerintah Hindia Belanda, serta laporan perkebunan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Afdeling Malang memegang peran penting serta masyarakat lokal banyak yang terlibat sebagai buruh perkebunan kopi di bawah kontrol ketat pemerintah dan pengusaha Belanda. Kontribusi Afdeling Malang terhadap ekonomi Hindia Belanda sangat besar, tetapi dibangun di atas struktur yang tidak adil bagi penduduk lokal.

Kata Kunci: afdeling Malang; ekonomi kolonial; kopi

Abstract: During the dutch colonial era, coffee was not just a commodity, but also a tool of power and the mainstay of the dutch east indies economy. The java region, especially the Malang Afdeling, played an important role in coffee production since the implementation of the forced cultivation system (*Cultuurstelsel*) in 1830. This research began with curiosity about how the role of Afdeling Malang, with all its geographical and social potential, contributed to the colonial economy for more than a century. The aims of this study is to trace the role of Afdeling Malang in the colonial coffee production and distribution network, particularly in the economic sector. as well as to see its impact on local communities at al time. The method used in this research is a historical research method from literature studies as the main technique for collecting data sources. The data sources analyzed include books, research journals, colonial archives, dutch east indies goverment document, and plantation report. From the research result, it was found that the Malang Afdeling played an important role and many local people were involved as coffee plantation workers under the strict control of the duthth goverment and businessmen. The contribution of the Malang Afdeling to the dutch east indies economy was enormous, but it was built on a structure that was unfair to the local population.

Keywords: afdeling Malang; coffee; economy colonial



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Di tanah Jawa, kopi pernah menjadi komoditas utama roda ekonomi era pendudukan Kolonial Belanda. Bukan hanya komoditas saja, namun juga sebagai alat kekuasaan untuk menjalankan perekonomian yang menopang kolonial Belanda pada masa itu. Salah satu wilayah yang turut menyumbang jalannya ekonomi tersebut adalah wilayah Malang. Afdeling Malang, yang saat itu merupakan unit administratif dan produksi dalam sistem perkebunan kolonial, berperan penting dalam menyuplai komoditas kopi Hindia Belanda. Sejak diberlakukannya sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada tahun 1830, kopi ditanam secara massal di berbagai wilayah Jawa, termasuk Malang untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa yang sangat laku keras. Namun, keberhasilan ekspor ini tak bisa dilepaskan dari cerita tentang tanah-tanah rakyat yang diambil alih. Kerja paksa yang menindas rakyat bumiputra, dan kehidupan petani yang jauh dari sejahtera.

Pada periode tahun 1830 sampai 1930, dalam konteks kebijakan ekonomi kolonial dalam hal ini Afdeling Malang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi kolonial Belanda (Wicaksono & Alrianingrum, 2017; Ayundasari, et al., 2021). Penelitian ini juga mencakup pertanyaan sejauh mana kebijakan kolonial seperti sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) pada paruh pertama abad ke-19 dan politik ekonomi liberal setelah 1870 memengaruhi dinamika produksi kopi di Afdeling Malang. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama mengenai kontribusi Afdeling Malang dalam struktur ekonomi kolonial Belanda melalui komoditas kopi, serta mengungkap implikasi sosial-ekonomi yang ditimbulkannya terhadap masyarakat sepanjang satu abad dominasi kolonial, yaitu dari tahun 1830 hingga 1930.

Sementara itu, Elson (1994) berpendapat bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Van den Bosch membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di tanah jajahan. Bosch mengharuskan para petani untuk menanam tanaman kopi di lahan-lahan yang mereka kelola. Meskipun dalam kenyataannya lahan tersebut sebelumnya digunakan untuk kebutuhan pangan atau tanaman lain yang lebih menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Lebih dari itu, bahwa hasil dari panen kopi tersebut kemudian tidak semuanya menjadi milik petani, karena mereka diharuskan untuk menjual kepada Pemerintah Kolonial. Mengenaskan lagi dengan harga yang telah ditentukan, yaitu mengikuti harga pasar yang ditetapkan oleh pihak kolonial. Sistem budidaya kopi ini dilakukan secara luas di berbagai wilayah karesidenan lain, seperti Bagelen, Banten, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Banyumas, Jepara, Priangan, Rembang, Semarang, Kedu, Madiun, Kediri, Surabaya, Pasuruan, hingga Besuki. Perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada struktur pertanian lokal, namun juga memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang hidup di bawah tekanan sistem tanam paksa tersebut (Elson, 1994).

Sebagaimana dijelaskan oleh van Goor (1986), perkembangan perekonomian di Indonesia pada masa lalu tidak dapat lepas dari peran penting sektor perkebunan, yang mulai tumbuh sejak era *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Meskipun diawal sistem perkebunan berkembang di bawah kendali VOC, peran tersebut justru semakin menguat setelah VOC dibubarkan dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Belanda dan dengan cara lebih sistematis dan terstruktur menerapkan kebijakan kolonialisasi. Dalam sistem ekonomi kolonial tersebut, peran dari perkebunan terutama perkebunan kopi menjadi salah satu penyangga utama dalam keuangan pemerintah kolonial. Perlu diketahui, bahwa tanaman kopi bukan hanya dijadikan sebagai komoditas lokal, melainkan juga dijadikan sebagai produk unggulan yang sangat diminati di pasar internasional. Puncaknya terjadi pada masa diberlakukannya sistem Tanam Paksa atau *Cultuurstelsel* yaitu ketika petani di berbagai daerah diharuskan menanam komoditas ekspor termasuk kopi, dalam memenuhi permintaan global. Wilayah di Hindia

Belanda yang memiliki kondisi geografis berupa daerah pegunungan yang subur dan sejuk, seperti lereng-lereng gunung di Pulau Jawa, secara tidak langsung dijadikan sebagai pusat pengembangan perkebunan kopi. Salah satu wilayah yang ikut menjadi bagian dari sistem ini adalah Afdeling Malang. Layak untuk diketahui bahwa wilayah ini memiliki kontur alam yang sesuai untuk budidaya kopi. Lebih dari itu, wilayah ini dijadikan salah satu lumbung produksi kopi bagi kepentingan ekspor kolonial kala itu. Kehadiran sistem ini membawa dampak besar baik dari sisi ekonomi maupun sosial bagi masyarakat lokal yang harus menyesuaikan hidup mereka dengan kebutuhan dan kepentingan kekuasaan kolonial (van Goor, 1986).

Penulis setidaknya telah menemukan tiga artikel penelitian terdahulu yang dalam pembahasannya masih ada keterkaitan dengan penulisan artikel ini. Pertama, adalah kajian penelitian Hudiyanto (2015) yang meneliti perkebunan kopi dan gula di Regentschap Malang pada periode tahun 1832 sampai 1942. Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada dinamika perkembangan Regentschap Malang, dengan menelaah bagaimana pertumbuhan wilayah tersebut berlangsung seiring dengan kemajuan dan perluasan sektor perkebunan di sekitarnya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menonjolkan berbagai bentuk aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang hidup dan bekerja di sekitar kawasan perkebunan di Malang, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara perkembangan perkebunan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Kedua, penelitian Afgani dan Sarkawi (2018) yang membahas mengenai perkebunan kopi di wilayah Malang, dengan meninjau berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas dan dinamika kegiatan perkebunan yang berkembang di daerah tersebut periode tahun 1870 hingga 1930. Fokus kajian ini tidak hanya terbatas pada hasil produksi saja, tetapi juga mengenai pengelolaan tanah atau lahan perkebunan, tenaga kerja yang terlibat, serta sumber-sumber modal yang menopang kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas penggunaan teknologi yang diterapkan, skala dan bentuk organisasi perkebunan, hingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pihak pengelola perkebunan kopi di Malang pada periode tersebut. Sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakter dan perkembangan sistem perkebunan di daerah itu.

Ketiga, kajian penelitian oleh Bahtiar (2023) kajian ini berfokus pada gambaran dan dinamika kehidupan para buruh yang bekerja di perkebunan kopi wilayah Dampit yaitu kawasan dibawah Afdeling Malang pada rentang waktu tahun 1870 hingga 1930. Penelitian ini menyoroti berbagai aspek kehidupan orang sekitar Dampit, baik yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan kerja. Termasuk sistem pengupahan, pola hubungan antara buruh dengan pihak pengelola perkebunan, serta bentuk-bentuk interaksi sosial yang muncul di sekitar kawasan perkebunan kopi pada masa itu. Melalui fokus waktu yang cukup panjang tersebut, penelitian tersebut berupaya menggambarkan bagaimana situasi dan kesejahteraan buruh perkebunan mengalami perubahan seiring perkembangan sistem ekonomi kolonial dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dari ketiga penelitian terdahulu, penulis mendapatkan keterbatasan pada penelitian sebelumnya dalam pembahasan kopi di wilayah Afdeling Malang dengan periodisasi yang lebih luas yaitu tahun 1830 sampai 1930. Sehingga besar kemungkinan cakupan penelitian ini mempunyai andil yang lebih luas dari sisi periodisasi. Selain itu penelitian ini lebih fokus pada sumbangsih di bidang ekonomi secara mendalam pada Afdeling Malang terhadap Kolonial Belanda. Ada keterbaruan dalam penelitian ini salah satunya yaitu perekonomian Pemerintahan Belanda telah mengalami kenaikan secara signifikan. Terbukti dengan adanya faktor ekonomi perkebunan yang begitu berpengaruh telah membuat Afdeling Malang berkontribusi dalam pembentukan pusat perekonomian kota. Disamping itu faktor ekonomi juga mempengaruhi

berbagai komunitas untuk datang langsung ke Afdeling Malang untuk melakukan perdagangan seperti orang-orang Eropa, Arab, dan Melayu pada abad ke-19.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sektor perkebunan kopi di Afdeling Malang pada periode 1830–1930. Sekaligus mengungkap peran dan kontribusi wilayah tersebut terhadap stabilitas ekonomi kolonial Belanda melalui hasil produksi, ekspor, serta kebijakan pengelolaan perkebunan pada periode tersebut. Selain itu, penelitian ini berusaha mengungkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat lokal di sekitar perkebunan kopi di wilayah Afdeling Malang. Penelitian ini juga berusaha menggambarkan kebijakan kolonial yang memengaruhi pengelolaan perkebunan di Afdeling Malang selama satu abad. Serta menilai posisi strategis wilayah ini dalam jaringan produksi dan distribusi kopi khususnya di Jawa Timur. Sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi Afdeling Malang terhadap pembentukan ekonomi kolonial Hindia Belanda. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menelisik dan menelusuri kontribusi Afdeling Malang terhadap ekonomi kolonial Belanda saat itu. Serta melihat bagaimana praktik ekonomi ini membentuk relasi atau hubungan kekuasaan antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal disekitarnya. Selain itu, lebih dari sekedar menampilkan angka produksi atau data ekspor saja, namun tulisan ini ingin mengangkat sisi manusia dari sejarah kopi yaitu siapa yang menanam, siapa yang menikmati, dan siapa yang menanggung akibatnya. Melalui pendekatan sejarah, artikel ini berusaha menyusun kembali gambaran Afdeling Malang sebagai bagian penting dalam sistem kolonial yang lebih besar. Dengan seperti itu, kita tidak hanya memahami kopi sebagai produk saja, tetapi juga sebagai penanda zaman dan jejak kolonialisme yang masih membekas hingga hari ini.

Dari segi sudut pandang penulis, penelitian ini dianggap penting karena sektor perkebunan kopi merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi kolonial Belanda. Disatu sisi kontribusi spesifik wilayah Afdeling Malang terhadap pembangunan ekonomi kolonial masih kurang diperhatikan dalam literatur sejarah ekonomi kolonial. Ditambah lagi peneliti berupaya untuk menelusuri kembali suara-suara yang pernah dibungkam oleh narasi kekuasaan kolonial. Selama periode 1830 sampai 1930, Afdeling Malang tidak hanya menjadi pusat produksi kopi, tetapi juga menjadi tempat bertemunya interaksi sosial-ekonomi yang kompleks antara pemerintah kolonial, pengusaha perkebunan, dan buruh pribumi. Dengan mengkaji perkembangan perkebunan kopi serta dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis Malang dalam jaringan produksi dan distribusi kopi di Jawa. Selain itu penelitian ini dapat sekaligus memperkaya studi tentang dinamika ekonomi kolonial Hindia Belanda. Ditambah nilai lebih dari penelitian ini juga memiliki relevansi dalam memahami warisan sosial-ekonomi kolonial yang masih memengaruhi struktur pertanian dan masyarakat di wilayah Malang hingga masa kini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Pemilihan metode ini dipilih karena mampu menjawab kebutuhan untuk menggali secara mendalam mengenai kontribusi ekonomi yang terjadi dalam sektor perkebunan kopi di wilayah Afdeling Malang tahun 1830 sampai 1930. Kajian dalam penelitian ini tidak sekedar menghadirkan data sebagai angka atau fakta, namun berusaha menyusun narasi yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi mengenai kontribusi dalam bidang ekonomi Afdeling Malang dalam konteks pemerintahan Belanda. Tahap pertama dalam penelitian ini yaitu *heuristik* atau pengumpulan sumber data yang dilakukan oleh peneliti baik itu sumber yang sudah dikumpulkan berupa dokumen, serta beberapa sumber tertulis berupa buku dan artikel. Penelitian ini berfokus pada penelusuran

jejak historis yang tercatat dalam berbagai dokumen dan sumber tertulis, baik yang bersifat primer seperti berbagai jenis literatur dan dokumen, mulai dari laporan tahunan perusahaan perkebunan, arsip pemerintah Hindia Belanda, hingga catatan administrasi yang dibuat di tingkat lokal seperti di Afdeling Malang. Surat kabar dari masa kolonial juga dijadikan bahan kajian untuk melihat bagaimana narasi resmi dan opini publik saat itu terbentuk. Di samping itu, berbagai sumber sekunder seperti buku sejarah, artikel dari jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan tulisan akademik lainnya juga turut digunakan untuk memperkaya analisis. Setelah mendapatkan sumber-sumber tersebut, tahap kedua yang dilakukan yaitu *kritik sumber*. Dalam tahap ini kritik sumber yang penulis lakukan berupa membandingkan beberapa sumber dari buku maupun jurnal dimana setidaknya memuat informasi yang membantu dalam penulisan penelitian ini. Tahap ketiga yaitu *interpretasi*, yang mengharuskan penulis menafsirkan sumber-sumber yang didapatkan tersebut. Dengan membaca dan menganalisis dokumen-dokumen sejarah, penulis mencoba memahami konteks ekonomi yang membentuk kebijakan dan praktik kolonial di sektor perkebunan terutama yang berhubungan dengan tanaman kopi, yang pada masa itu menjadi komoditas unggulan dalam sistem tanam paksa. Tahap terakhir yang dilakukan peneliti dalam tahapan ini yaitu *historiografi*. Dari sumber-sumber yang telah melewati kritik sumber, dapat diinterpretasikan berdasarkan apa yang akan dibahas dalam kajian ini.

Hasil Penelitian

Masuknya Kopi dan Awal Kolonialisme

Masuknya kapitalisme Barat ke Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung secara perlahan dan terstruktur melalui sistem ekonomi kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Salah satu bentuk konkret dari penerapan sistem tersebut adalah pendirian dan perluasan perkebunan, yang menjadi penopang ekonomi kolonial di wilayah Hindia Belanda. Latar belakang dari dibukanya berbagai perkebunan, khususnya perkebunan kopi, sangat erat kaitannya dengan tingginya permintaan dan nilai jual kopi di pasar internasional pada masa itu. Komoditas kopi dianggap sangat menguntungkan dan memiliki potensi besar untuk menopang perekonomian negeri penjajah. Namun, sejarah yang terurai panjang kopi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum masa kolonial mencapai puncaknya. Sekitar tahun 1696, kopi pertama kali diperkenalkan ke nusantara oleh seorang perwira Belanda bernama Laksamana *Pieter van den Broecke*. Dalam usahanya menjalin relasi dagang dengan bangsa Arab, ia membawa masuk biji kopi ke tanah Indonesia. Pada masa itu, masyarakat mengenal minuman ini dengan sebutan *Qohwah*, yang secara harfiah berarti “air hitam” sebuah julukan yang merefleksikan tampilan fisik kopi namun belum mencerminkan kompleksitas perjalanan sosial dan ekonominya. Sejak saat itu, kopi bukan hanya menjadi bagian dari keseharian masyarakat, tetapi juga menjadi simbol dari dinamika kekuasaan, perdagangan, dan pengaruh global yang perlahan mengubah lanskap ekonomi dan budaya bangsa (Spillane, 1990).

Menurut Lakeman (1934) setidaknya ada dua faktor yang membuat wilayah Malang dijadikan sebagai Kawasan perkebunan. *Pertama*, Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignies (1826–1829), muncul suatu gagasan strategis dalam bidang ekonomi dan agraria kolonial yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi komoditas ekspor di wilayah Hindia Belanda. Du Bus melihat bahwa upaya sebelumnya untuk memperluas hasil tanaman ekspor di Pulau Jawa belum mencapai hasil yang diharapkan, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan lahan produktif yang dapat dimanfaatkan serta rendahnya efisiensi dalam sistem pertanian rakyat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia mengajukan kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan tanah-tanah yang tidak berpenghuni atau dianggap terasing, dengan cara mengalihkannya kepada para pengusaha perkebunan Eropa.

Melalui kebijakan ini, ia berharap akan tercipta suatu sistem produksi yang lebih terorganisasi dan berorientasi pada pasar internasional, di mana sektor perkebunan swasta Eropa dapat berperan sebagai penggerak utama ekonomi kolonial. *Kedua*, Pemerintah kolonial mulai mengarahkan perhatiannya ke wilayah bagian selatan Jawa seiring dengan keberhasilan Malang dalam menghasilkan dan mengirimkan komoditas kopi ke pusat-pusat perdagangan kolonial. Pada tahun 1826, bersamaan dengan konsolidasi pembentukan Negara Kolonial Belanda, wilayah Malang mulai diposisikan sebagai salah satu kawasan strategis yang tidak dapat dipisahkan dari proyek eksploitasi ekonomi kolonial. Kondisi wilayah yang sebelumnya tertutup dan relatif terbelakang perlahan berubah ketika Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignies mengeluarkan kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Melalui instruksi tersebut, pemerintah kolonial memerintahkan agar seluruh tanah yang belum digarap, termasuk sebagian kawasan hutan, dialihfungsikan menjadi lahan produktif guna meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan (Lakeman, 1934).

Perkembangan sektor perkebunan di negara berkembang seperti Indonesia, pada dasarnya tidak bisa dipahami secara utuh tanpa melihat sejarah panjang dari kolonialisme itu sendiri. Muncul dan berkembangnya pun juga dipengaruhi oleh adanya praktik kolonialisme dan imperialisme yang ada didalamnya. Sehingga dalam perkembangannya termasuk kapitalisme global dan dorongan modernisasi yang dibawa dari luar. Di Sebagian besar wilayah seperti Indonesia, sistem perkebunan tidak muncul secara alami dari kebutuhan masyarakat lokal. Namun sistem tersebut sebagai bagian dari langkah besar ekspansi kapitalisme agraris yang dibawa oleh kekuatan kolonial Barat. Melalui ekonomi kolonial inilah, praktik dan struktur pertanian masyarakat lokal mulai berkembang dan diarahkan menuju sistem baru yang lebih terorganisir namun juga sarat kepentingan luar (Kartodirjo & Suryo, 1991). Di awal kemunculannya, sistem perkebunan ini memperkenalkan pola pertanian yang sangat berbeda dari kebiasaan lokal. Jika sebelumnya pertanian dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sendiri atau komunitas yang mendiaminya, kini masyarakat mulai diarahkan pada pertanian komersial dengan skala produksi besar. Pola ini bukan hanya mengubah cara bercocok tanam, tapi juga cara masyarakat memahami tanah, tenaga kerja, dan nilai dari hasil pertanian itu sendiri. Dengan kata lain, sistem perkebunan kolonial menjadi titik awal perubahan besar dalam hubungan manusia dengan alam dan dengan sesamanya.

Di era kolonialisme Belanda, perkebunan tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi kolonial, namun juga menjadi titik awal munculnya dualisme ekonomi yang membentuk struktur kehidupan masyarakat Jawa hingga hari ini yaitu ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Tidak terkecuali pada perkebunan kopi di Afdeling Malang yang berperan penting di dalamnya. Sistem perkebunan hadir dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, khususnya melalui komoditas seperti kopi. Sistem perkebunan inilah yang secara perlahan membuka pintu masuk bagi berkembangnya kapitalisme di tanah Jawa. Hal yang paling tidak diinginkan bumiputra muncul di balik perkembangan itu yaitu tersimpan sebuah kenyataan pahit. Serta disatu sisi sistem ini juga menjadi titik munculnya kesenjangan sosial yang semakin terasa seiring berjalannya waktu. Mengacu pada pandangan ekonom Belanda, J.H. Boeke, dualisme ekonomi ini bisa diibaratkan seperti dua dunia yang hidup berdampingan namun terpisah. Menginterpretasikan seolah berada dalam dua kapsul berbeda yang tidak saling menyatu. Sementara itu, ekonomi modern yang lahir dari aktivitas perkebunan dan perdagangan internasional, mempunyai ciri dengan produksi berskala besar, penggunaan teknologi, dan berorientasi ekspor internasional. Disatu sisi, ekonomi tradisional tetap bertumpu pada aktivitas berskala kecil, bahkan hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, serta berorientasi pada pasar local (Hudiyanto, 2015).

Sistem perkebunan pada masa kolonial Belanda, khususnya di Afdeling Malang, tidak hanya membawa perubahan ekonomi tetapi juga meninggalkan warisan sosial yang begitu nyata dan kompleks. Perkebunan kopi menjadi pintu masuk bagi berkembangnya kapitalisme dan munculnya ekonomi modern di tanah Jawa khususnya yang berada dibawah naungan Afdeling Malang. Namun, di balik kemajuan itu, terjadi pula kesenjangan sosial dan munculnya dualisme ekonomi antara sektor modern dan tradisional. Hingga kini, warisan dualisme tersebut masih dapat dirasakan dalam struktur ekonomi dan kehidupan masyarakat Jawa.

Secara keseluruhan, bahwa masuknya sistem kapitalisme Barat Ketika itu tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses kolonial yang terstruktur, terutama lewat pengembangan sistem perkebunan salah satunya seperti komoditas kopi. Perlu diketahui bersama, bahwa perkebunan bukanlah sistem asli masyarakat bumiputra, melainkan bentuk dari ekspansi kapitalisme agraris yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan pasar global yang semakin besar. Berkaitan dengan hal itu, sistem ekonomi kolonial menciptakan pergeseran besar dalam struktur pertanian local yaitu dari pertanian subsisten ke arah produksi massal untuk keperluan kebutuhan ekspor. Secara tidak langsung hal ini memicu perubahan dalam hubungan masyarakat, serta turut membentuk fondasi dualisme ekonomi yang membelah masyarakat bumiputra menjadi dua bagian yaitu ekonomi modern dan ekonomi tradisional.

Afdeling Malang dalam Sistem Tanam Paksa dan Agrarische Wet

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) diberlakukan di Indonesia pada tahun 1830 oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Dalam kenyataannya sistem ini mewajibkan rakyat di Jawa untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, teh, dan tembakau di sebagian tanah mereka dan hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan Belanda yang saat itu sedang mengalami krisis keuangan. Sistem Tanam Paksa berlangsung selama sekitar 40 tahun, dan mulai dihapus secara bertahap sejak tahun 1870, ketika sistem ekonomi liberal dan politik pintu terbuka atau politik ekonomi bebas mulai diterapkan di Hindia Belanda.

Wilayah *Regentschap* Malang pada masa kolonial mencakup delapan distrik, termasuk Ngantang, Penanggungan, hingga Kota Malang. Kawasan ini dikenal subur dan menjadi pusat aktivitas para pengusaha perkebunan, terutama di lereng Semeru, Bromo, Arjuna, dan Kawi. Banyak perkebunan atau *onderneming* bermunculan di akhir abad ke-19. Tahun 1832 dipilih sebagai titik awal pembahasan karena saat itulah pemerintah kolonial mulai membuka lahan kopi di daerah ini (Domis, 1836).

Secara umum, Malang memiliki letak geografis yang cukup istimewa jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di sekitarnya. Sebelum ekonomi perkebunan diperkenalkan, kawasan ini belum dianggap sebagai wilayah yang memiliki peran strategis. Karena belum adanya penggunaan lahan yang signifikan untuk sistem perkebunan ekonomi kolonial. Namun, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19 mulai membuka jalan dan perhatian terhadap wilayah yang sebelumnya belum dianggap strategis dan istimewa. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1832, pemerintah kolonial memulai proyek pembukaan lahan di Afdeling Malang untuk ditanami kopi sebagai bagian dari sistem tanam paksa. Kawasan Afdeling Malang sendiri terletak di antara dua jajaran pegunungan besar, yakni Arjuna-Kawi di sisi barat dan Bromo-Semeru di sisi timur. Letaknya yang dikelilingi pegunungan berapi aktif membuat tanah di wilayah ini sangat subur karena kaya akan abu vulkanis serta memiliki akses air yang melimpah. Kedua faktor inilah yang kemudian menjadikan wilayah ini sangat ideal untuk pengembangan perkebunan pada masa kolonial

(Hudiyanto, 2011). Perlu diketahui bahwa, wilayah Afdeling terletak diantara pegunungan aktif yang membuat wilayahnya cukup subur untuk ditanami dengan jenis tanaman tertentu. Disamping itu letaknya yang cukup strategis membuat perkebunan kopi cocok untuk dibudidayakan di daerah ini. Melalui potensi alamnya, Afdeling Malang pun berperan penting dalam menunjang produksi komoditas ekspor pada masa kolonial. Namun di balik itu, keberhasilan tersebut juga menyimpan kisah eksploitasi tenaga dan sumber daya lokal demi kepentingan ekonomi kolonial.

Perluasan sektor perkebunan di wilayah Malang berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di kawasan tersebut. Pertambahan populasi ini sebagian besar disebabkan oleh arus migrasi penduduk dari luar daerah Malang yang datang untuk mencari peluang ekonomi. Kenaikan jumlah penduduk membawa konsekuensi langsung terhadap dinamika perekonomian dan perkembangan kota, sebab semakin besar populasi, semakin tinggi pula kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kondisi tersebut mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di berbagai bidang, terutama dalam sektor produksi, perdagangan, serta konsumsi. Fenomena ini semakin jelas terlihat karena sebagian besar peningkatan jumlah penduduk didominasi oleh kelompok bumiputera yang bekerja sebagai buruh pada perkebunan dan industri yang mulai berkembang pesat menjelang akhir abad ke-19 (Wirakartakusumah, 1999). Perkembangan sektor perkebunan di Malang tidak hanya membawa perubahan pada struktur ekonomi daerah, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap komposisi demografis dan kehidupan sosial masyarakatnya. Arus migrasi tenaga kerja dari berbagai wilayah menciptakan dinamika baru dalam sistem produksi dan distribusi ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Malang sebagai salah satu pusat kegiatan agraria penting di Jawa Timur.

Perluasan kekuasaan VOC ke wilayah Malang pada dasarnya tidak didorong oleh kepentingan ekonomi saja, melainkan lebih karena pertimbangan politik yang berkembang. Saat itu, daerah Malang tidak dianggap memiliki komoditas yang cukup berharga untuk menarik perhatian serius dari VOC. Kemudian pandangan ini diperkuat oleh sebuah catatan sejarah yang menyebutkan bahwa VOC pernah melikuidasi Kabupaten Malang dan meleburkannya ke dalam wilayah Kabupaten Bangil pada akhir abad ke-18. Alasan di balik keputusan itu adalah karena Malang dinilai tidak mampu memasok beras dalam jumlah yang memadai kepada VOC. Bahkan hingga tahun 1820, kawasan yang berada di selatan Pasuruan ini masih dianggap sebagai wilayah pinggir yang belum memberikan kontribusi ekonomi yang berarti bagi kepentingan kolonial (Elson, 1984). Dapat dilihat bahwa posisi Malang dalam struktur kekuasaan kolonial pada masa awal ekspansi VOC tidaklah menonjol, baik dari segi ekonomi maupun strategis. Motif politik tampak lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi, sebab wilayah ini belum memiliki potensi komoditas yang mampu menarik investasi atau perhatian besar dari pihak kolonial. Kebijakan likuidasi Kabupaten Malang oleh VOC menjadi bukti bahwa wilayah ini sempat dipandang tidak produktif dan tidak memberikan keuntungan material yang signifikan bagi kepentingan dagang Belanda.

Pada tahun 1870 lebih tepatnya setelah diberlakukan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*), kondisi sektor perkebunan di Hindia Belanda mulai menunjukkan perubahan. Pemberlakuan regulasi ini membuka pintu yang cukup lebar bagi para investor asing untuk ikut serta dan turut membangun perkebunan menjadi lebih besar lagi. Kemudian para investor asing tersebut mengambil bagian dalam dinamika ekonomi yang sebelumnya lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Undang-undang ini juga mendorong perluasan lahan perkebunan secara signifikan ke wilayah yang sebelumnya belum banyak terjamah, seperti hutan-hutan pedalaman dan lereng pegunungan. Di kawasan Afdeling Malang, perkembangan ini terlihat jelas dari terus bertambahnya perkebunan kopi sepanjang akhir abad ke-19. Banyak perusahaan swasta mulai bermunculan dan berkontribusi pada peningkatan hasil produksi kopi,

sekaligus membawa berbagai perubahan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah perkebunan cc).

Tabel 1. Daftar Nama dan Pemilik Perkebunan Kopi di Malang, 1881-1899

Distrik	Nama Perkebunan	Nama Pemilik	Luas Kebun	Tanggal Daftar Hak sewa
Gondang Legi	N. V. Limburg	J. A. H Everard	424	21 Juli 1881
	Zuid-Java Cultuur Mij.	J. Engelberts	420	19 Juli 1883
	N.V. Toeren Estates	F.C. van baak	492	13 Oktober 1881
Turen	N.V. Oost-Java Rubber Mij.	A.J. Gogeit	482	28 Januari 1892
	N.V. javasche Rubber Mij.	P. Termijtelen	526	30 April 1880
Sengguruh (Kepanjen)	Cult. Mij. Kalitelo	C. L. Lammer Listnet	382	30 Juli 1881
	Cult. Mij. Alas Tledak	F. A. von Wiederhold	538	5 Desember 1882

Sumber: *Lijst van Particuliere Ondernemingen In Nederlandsch-Indië Op Gronden Door Het Gouvernement Afgestaan in Huur (Voor Landbouwdoeleinden) En Erfpacht*, Koleksi Pasoeroean 62.3, ANRI.

Tabel di atas menggambarkan daftar beberapa perkebunan di wilayah Afdeling Malang pada masa kolonial Belanda, yang tersebar di tiga distrik utama, yaitu Gondanglegi, Turen, dan Sengguruh (Kepanjen). Setiap perkebunan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Belanda berbentuk N. V. (*Naamloze Vennootschap*) atau *Cultuur Maatschappij* (Perusahaan Perkebunan). Luas kebun bervariasi antara sekitar 382 hingga 538 hektare, dan waktu pendaftaran hak sewa lahan berkisar antara tahun 1880 hingga 1892. Data ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi kolonial yang cukup intens di kawasan Malang, terutama dalam pengelolaan komoditas perkebunan seperti kopi, karet, atau tebu yang menjadi bagian dari sistem ekonomi kolonial pada masa itu.

Wilayah Afdeling Malang mengalami perubahan yang cukup signifikan dari daerah yang awalnya dipandang tidak strategis oleh VOC kemudian menjadi pusat aktivitas perkebunan penting pada masa kolonial Belanda. Keunggulan geografisnya terletak di antara pegunungan berapi aktif dengan tanah subur dan sumber air melimpah menjadikannya sangat cocok untuk budidaya kopi. Kebijakan tanam paksa pada tahun 1832 dan diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 menjadi momentum penting yang mendorong pertumbuhan sektor perkebunan. Selain itu, momentum tersebut juga membuka peluang investasi asing, serta perluasan lahan ke daerah-daerah terpencil. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan produksi kopi secara signifikan, tetapi juga menimbulkan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan Malang, menjadikannya wilayah dengan peran strategis dalam sistem ekonomi kolonial Hindia Belanda.

Dampak Ekonomi dan Warisan Kolonial

Seiring berjalannya waktu, perkembangan di sektor perkebunan kopi telah mengangkat nama Malang sebagai wilayah yang mulai diprioritaskan secara serius oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara signifikan, kesuksesan ekonomi ini membawa dampak berkesinambungan, seperti dibukanya jalur kereta api yang menghubungkan Malang dan Surabaya pada tahun 1879. Setelahnya, 10 tahun kemudian diikuti oleh pembangunan jalur trem menuju Dampit dan

Tumpang pada tahun 1889. Tidak hanya itu saja, bahkan dampak yang diakibatkan yaitu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru seperti perusahaan dagang, toko, rumah sakit, sekolah, dan lembaga penelitian perkebunan. Semua perubahan ini secara tidak langsung membentuk identitas Kota Kabupaten Malang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, yang semakin hari semakin kental dengan nuansa kolonial Belanda. Selain itu, diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah kota dan Afdeling Malang sangat dipengaruhi oleh dua hal utama. Pertama, majunya sektor perkebunan dan kedua kemampuan wilayah ini bertahan dari wabah penyakit. Di masa sebelum tahun 1914, kawasan onderdistrik kota Malang memang sempat dilanda wabah pes dan kolera, namun masa penyebarannya relatif singkat dan tidak menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan penduduk. Justru perkembangan lahan pertanian seperti sawah dan tegalan menjadi faktor penting yang mendorong masuknya pendatang dari berbagai daerah di luar Malang, seperti Jawa Tengah dan Madura, hingga akhirnya tercatat bahwa pada tahun 1847 jumlah penduduk Afdeling Malang mencapai 87.990 jiwa (Hudiyanto, 2015). Keberhasilan ekonomi di bidang ini tidak hanya memperkuat posisi Malang dalam jaringan perdagangan kolonial, tetapi juga memicu pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang modern lainnya. Munculnya jalur transportasi, pusat ekonomi, serta lembaga sosial dan pendidikan menandai perubahan besar dalam struktur wilayah ini. Akibatnya, Malang tumbuh menjadi kawasan yang strategis dan berpengaruh, sekaligus mencerminkan kuatnya jejak kolonial dalam perkembangan kotanya hingga masa kini.

Disisi lain, jumlah dan keragaman penduduk di Afdeling Malang mulai meningkat dan menunjukkan perubahan pesat yaitu lebih dari 80.000 penduduk bumiputera tercatat. Angka ini tergolong tinggi dibanding wilayah lain pada masa itu. Dibandingkan tahun 1846, terjadi penambahan sekitar 3.490 jiwa, yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi dari Kediri, Surabaya, dan Pasuruan, serta meningkatnya angka kelahiran. Perpindahan penduduk ini erat kaitannya dengan pembukaan lahan di distrik Kota Malang, Sengguruh, dan Gondanglegi. Selain migrasi, pertumbuhan penduduk juga didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi akibat berkembangnya industri, perkebunan, dan perdagangan. Sementara itu, peningkatan layanan kesehatan, seperti vaksinasi cacar sejak 1850, turut memperkuat pertumbuhan ini (van Schaik, 1996).

Tabel 2. Jumlah penduduk afdeling Malang tahun 1847

No.	Etnis	Jumlah
1	Jawa	83.419
2	Madura	3.881
3	Eropa	103
4	Arab	8
5	Melayu	114
6	Cina	465

Sumber: Algemeen verslag van de Afdeling Malang 1847, Koleksi arsip Pasuruan. ANRI

Afdeling Malang terkenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi terbesar di Provinsi Jawa Timur. Pada periode 1887 hingga 1889, jumlah produksi kopinya mencapai angka luar

biasa, yaitu 143.173 pikul. Jika dibandingkan, daerah-daerah lain seperti Besuki (yang mencakup Banyuwangi dan Jember), Probolinggo, serta Jombang hanya mampu menghasilkan sekitar 13.630, 22.098, dan 4.332 pikul kopi. Artinya, produksi kopi dari Afdeling Malang hampir sepuluh kali lebih besar dibanding wilayah Besuki. Capaian ini tentu bukan kebetulan, melainkan didukung oleh kondisi geografis yang sangat mendukung. Afdeling Malang dikelilingi oleh kawasan pegunungan aktif, yang menyumbang tanah subur dan iklim ideal bagi pertumbuhan tanaman kopi (*Koloniaal Verslag*, 1890). Afdeling Malang dikenal memiliki sumber air yang melimpah, bahkan saat musim kemarau berlangsung. Hal ini tidak lepas dari letaknya yang berada di kawasan pegunungan, dikelilingi oleh gunung-gunung serta vegetasi yang lebat dan kuat di dataran tinggi. Tanaman kopi yang dibudidayakan di wilayah ini sebagian besar berasal dari jenis Robusta, yang memang cocok dengan kondisi alam setempat. Selain itu, jenis kopi lainnya seperti Arabika atau kopi Jawa dan Liberia juga turut ditanam meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit (Sardjono, 1954).

Salah satu dampak penting dari perkembangan perkebunan yang terkadang luput dari pembahasan adalah dibangunnya jaringan transportasi untuk memperlancar distribusi hasil panen ke pasar internasional. Fungsi utamanya adalah menjadi jalur penghubung dalam pendistribusian dari lahan perkebunan ke gudang-gudang produksi. Karena banyak lokasi produksi berada di pedalaman, dibutuhkan jalur yang menghubungkan area produksi dengan pusat pengumpulan. Salah satu contohnya adalah *Onderdistrik* Kasembon di Distrik Ngantang, yang sudah dikenal sebagai pemukiman sebelum tahun 1830. Wilayah ini menjadi penting karena menghubungkan Malang dan Kediri serta dikenal subur, terutama karena sering menerima hujan abu dari letusan Gunung Kelud (Hudiyanto, 2015). Berbagai macam transportasi lokal seperti dokar, gerobak, dan lori sudah digunakan, sementara untuk jarak jauh dipakai trem atau kereta api. Salah satu fungsinya adalah mengangkut hasil bumi, terutama kopi. Koran kolonial bahkan mencatat penggunaan gerobak dan lori di jalur rel untuk membawa kopi dari perkebunan. Lori, yang ramping dan berjalan di jalur satu arah, dikemudikan melintasi kebun kopi untuk membawa hasil panen ke bawah gunung agar lebih mudah dijangkau oleh kereta api (Het Nieuws van Den Hag voor Nederladsch Indie, 1919).

Pada kajian Hudiyanto (2011) menjelaskan bahwa penerapan kebijakan ekonomi liberal pada tahap awal menunjukkan hasil yang sangat mengesankan. Keberhasilan ini sejalan dengan ekspektasi pemerintah kolonial, di mana nilai ekspor pada periode awal pelaksanaan kebijakan tersebut tercatat mencapai 47 juta gulden. Di wilayah Malang, pertumbuhan sektor perkebunan pada dekade 1875 sampai 1880-an juga berlangsung dengan cepat. Selama periode ini, jumlah pengusaha dan perusahaan perkebunan yang didirikan meningkat secara signifikan, dengan total pendapatan mencapai 169 juta gulden. Fakta ini menunjukkan bahwa lahan di Afdeling Malang memiliki kesuburan yang tinggi dan kondisi yang sangat mendukung sebagai lokasi investasi, sehingga kawasan tersebut menjadi salah satu pusat perkebunan yang menjanjikan bagi pihak kolonial (Hudiyanto, 2011).

Selama bertahun-tahun, wilayah Pulau Jawa khususnya wilayah Afdeling Malang menikmati kemajuan pesat berkat industri perkebunan kopi. Namun, kejayaan itu perlahan memudar ketika banyak pelaku usaha mulai mengalihkan lahan dari kopi ke tanaman tebu, menjadikan tebu sebagai pesaing utama dalam sektor perkebunan. Pergeseran ini terlihat dari berdirinya sejumlah pabrik gula besar di Malang, seperti Kebon Agung, Krebet, dan Panggungrejo. Situasi semakin memburuk ketika pendudukan Jepang dimulai. Mereka mengganti tanaman ekspor seperti kopi menjadi tanaman pangan karena fokus utama berubah dari perdagangan menjadi pemenuhan kebutuhan logistik perang (Anggraeni, 2021). Pertumbuhan jumlah penduduk turut memengaruhi sektor lain, salah satunya adalah dunia perdagangan. Keberadaan pasar menjadi pusat penting dalam menggerakkan roda

perekonomian kota. Di Onderdistrik kota Malang, komunitas Eropa, Arab, dan Melayu aktif mengembangkan kegiatan niaga mereka. Salah satu tokoh pedagang besar dari komunitas Eropa adalah *H. Spruytenburg*, yang dikenal menjual berbagai kebutuhan harian. Seiring waktu, semangat berwirausaha mulai tumbuh di kalangan pedagang menengah lainnya. Pada dekade 1870-an, laju pertumbuhan penduduk meningkat pesat. Hingga akhir tahun 1872, tercatat ada 284 orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, termasuk di antaranya kelompok mestizo atau keturunan campuran (*Politiek verslag Afdeeling Malang*, 1873).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Malang pada paruh kedua abad ke-19 tidak hanya membawa perubahan demografis, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan aktivitas ekonomi, khususnya di bidang perdagangan (Abubakar, et al., 2020). Meningkatnya populasi, terutama dari kalangan Eropa dan kelompok keturunan campuran, menciptakan dinamika baru dalam kehidupan kota yang semakin terbuka terhadap interaksi lintas etnis dan budaya. Keberadaan para pedagang dari komunitas Eropa, Arab, dan Melayu memperkuat peran Malang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Jawa. Aktivitas niaga yang berkembang di pasar-pasar lokal mencerminkan transformasi sosial-ekonomi yang mulai menandai munculnya karakter urban pada Malang kolonial, sebuah proses yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah ini pada periode-periode selanjutnya.

Kesimpulan

Masuknya kapitalisme barat ke Hindia Belanda ketika itu berlangsung secara bertahap melalui sistem ekonomi kolonial, terutama melalui pengembangan perkebunan kopi sejak tahun 1832 di Afdeling Malang. Perkebunan kopi tidak hanya menjadi penggerak utama dalam transformasi ekonomi kolonial, akan tetapi juga mengubah struktur sosial dan pertanian masyarakat lokal. Wilayah Malang yang awalnya dipandang tidak strategis, berkembang menjadi pusat produksi kopi terbesar di Jawa Timur pada 1887 sampai 1889, dengan produksi mencapai 143.173 pikul, hampir sepuluh kali lipat dari wilayah lain seperti Besuki dan Jombang. Kebijakan kolonial seperti *Agrarische Wet* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 membuka peluang investasi asing. Sistem tersebut juga memperluas lahan, dan mendorong modernisasi sistem produksi yang sebelumnya bersifat subsisten. Perkembangan ini juga membawa dampak besar pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalur kereta 1879 dan trem 1889, serta tumbuhnya industri pendukung, hingga perubahan demografi dan sosial. Namun, kejayaan kopi kemudian menurun seiring persaingan dengan tebu dan kebijakan pendudukan Jepang pada 1940-an yang mengalihkan fokus pada tanaman pangan. Afdeling Malang menjadi contoh nyata bagaimana kolonialisme, komoditas global, dan dinamika lokal membentuk wajah ekonomi dan struktur masyarakat Indonesia hingga hari ini.

Daftar Rujukan

- Abubakar, A., Krisdiana, R., Hudiyanto, R. R., Handinoto, Seniorita, S., Pratiningrum, Balqis, R. H., Akbar, A., Wibawa, M. A. (2020). *Seri Buku Sejarah & Heritage: Dari Rimba Menjadi Kota Bank Indonesia dalam Evolusi Malang Raya*. Bank Indonesia Institute.
- Afgani, R., & Husain, S. B. (2018). Manisnya Kopi di Era Liberal: Perkebunan Kopi Afdeling Malang, 1870-1930. *Indonesian Historical Studies*, 2(1), 24–35. <https://doi.org/10.14710/ihis.v2i1.3199>.
- Anggraeni, & A. (2021). *KOPI, PAGEBLUK, DAN KOTA: Menyulam Wajah Kota Malang di Era Kolonial* (Z. Arifin, Ed.). Terakota.

- Ayundasari, L., Sayono, J., & Utari, S. D. (2021). Impact of ecological landscape changes toward community life in Southern Malang during the 19th–20th Century. In *Community Empowerment through Research, Innovation and Open Access* (pp. 93-98). Routledge.
- Domis, H. (1836). *De Residentie Pasoeroeang*. Gedrukt bij H SJ De Groot, MDCCCXXXVI.
- Elson, R. E. (1984). *Javanese Peasant and the Kolonial Sugar Industry. Impact and Change in an East Java Residency*. Oxford University Press.
- Elson, R. E. (1994). *Village Java Under the Cultivation System, 1830-1870*. National Library of Australia.
- Hudiyanto, R. (2011). *Menciptakan Masyarakat Kota Malang di Bawah Kekuasaan*. Lilin.
- Hudiyanto, R. (2015). Kopi dan gula: Perkebunan di kawasan regentschap Malang, 1832-1942. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(1), 96–115. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/1565>.
- Het Nieuws van Den Hag voor Nederladsch Indie. 1919.
- Kartodirjo, S., & Suryo, D. (1991). *Sejarah Perkebunan Indonesia*. Aditya Media.
- Koloniaal Verslag. (1890). *No Title*.
- Lakeman, P. K. W. (1934). *Stadsgemeente Malang 14 April 1914-1934*. G. Kolff & Co.
- Politiek verslag Afdeeling Malang. 1873.
- Sardjono. (1954). *40 Tahun Kota Malang*. DPK Malang.
- Spillane, J. (1990). *Komoditi Kopi dalam Perekonomian Indonesia*. Kanisius.
- Muhammad Bahtiar Syarifudin, M. B., Sapto, A., Hudiyanto, R. (2023). Kehidupan buruh perkebunan kopi di Dampit tahun 1870-1930. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 3(2), 174-185. <https://doi.org/10.17977/um081v3i22023p174-185>.
- van Goor, J. (1986). *Trading Companies in Asia, 1600-1830*. Het Uitgevers.
- van Schaik, A. (1996). *Malang. Beeld van een Stad*. Purmerend Asia Maior.
- Wicaksono, G. W. T., & Alrianingrum, S. (2017). Malang Stoomtram Maatschappij pada Masa Kolonial di Malang Tahun 1901-1930. *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 639-649. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/20296>.
- Wirakartakusumah, M. D. (1999). *Bayang-bayang Ekonomi Klasik*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yuliati, D. (2018). Nasionalisme Buruh Versus Kolonialisme: Suatu Kajian Tentang Gerakan Buruh di Semarang pada Awal Abad XX. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(2), 213–224. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.2.213-224>.
- Yuliati, Y. (2012). Sistem Pemerintahan Wilayah Malang Pada Masa Kolonial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 25(1), 53–61. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5506>.